

SKRIPSI

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMANTAU KETERBUKAAN
INFORMASI PUBLIK TERHADAP BADAN PUBLIK
(Studi Kasus Komisi Pemilihan Umum Sumbawa Tahun 2020)**

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1)
Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram



Disusun Oleh :

RIZKI YARMAN SEPTIANSYAH

218130087

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
TAHUN 2022**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMANTAU KETERBUKAAN
INFORMASI PUBLIK TERHADAP BADAN PUBLIK
(Studi Kasus Komisi Pemilihan Umum Sumbawa Tahun 2020)

Oleh:

RIZKI YARMAN SEPTIANSYAH

NIM. 218130087

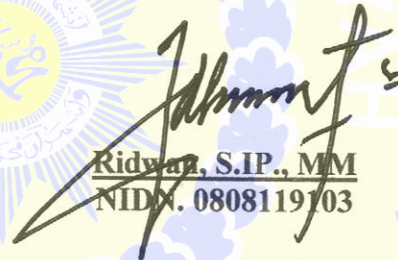
Untuk memenuhi ujian Sidang Skripsi
Tanggal, Agustus 2022

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II


Ayatullah Hadi, S.IP., M.IP
NIDN. 0816057902


Ridwan, S.IP., MM
NIDN. 0808119103

Mengetahui,
Program Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram
Kedua,


Ayatullah Hadi, S.IP., M.IP
NIDN: 0816057902

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI
PUBLIK TERHADAP BADAN PUBLIK
(Studi Kasus Komisi Pemilihan Umum Sumbawa 2020)

Oleh :

RIZKI YARMAN SEPTIANSYAH
NIM.218130087

PROGRAM STUDI
ILMU PEMERINTAHAN

Telah Dipertahankan Dalam Ujian Skripsi Pada Tanggal 5 Agustus 2022 dan
Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Kelulusan

Tim Penguji,

1. **Ayatullah Hadi, S.IP., M.IP**
NIDN.0816057902

PU

2. **Ridwan, S.IP., MM**
NIDN.0809119103

PP

3. **Hidayatullah, S.IP., M.IP**
NIDN.0809038902

PN

Mengetahui,
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram

Dekan,

Dr. H. Muhammad Ali, M.Si
NIDN. 0806066801

PERNYATAAN KEASLIAN SKRPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Rizki Yarman Septiansyah
NIM : 218130087
Jurusan : Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul “PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMANTAU KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TERHADAP BADAN PUBLIK (Studi Kasus Komisi Pemilihan Umum Sumbawa Tahun 2020)” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika saya terbukti melakukan plagiat tulisan/karya orang lain, siap menerima sanksi yang telah ditentukan oleh lembaga. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sadar tanpa tekanan dari pihak manapun.

Mataram, 2022

Saya yang menyatakan,



Rizki Yarman Septiansyah

NIM. 218130087



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizki Yarman Septiansyah
NIM : 218130087
Tempat/Tgl Lahir : PLAMPANG, 16 September 2000
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
No. Hp : 082 236 573 635
Email : rizki.yarman1609@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

Partisipasi Masyarakat Dalam Memanfaatkan Keterbukaan Informasi
Publik terhadap Badan Publik
(Studi kasus Komisi Pemilihan Umum Sumbawa Tahun 2020)

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 45%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milik orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya **bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikain surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 26 Agustus 2022
Penulis

Mengetahui,
Kepala UPT Perpustakaan UMMAT

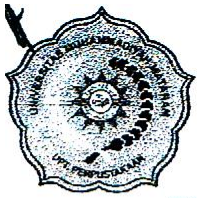


Rizki Yarman Septiansyah
NIM. 218130087



iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

*pilih salah satu yang sesuai



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizki Yarman Septiansyah
NIM : 218130087
Tempat/Tgl Lahir : PLAMPANG, 16 September 2000
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
No. Hp/Email : 082-236 573 635 / rizkiyarman1609@gmail.com
Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Partisipasi Masyarakat Dalam Memantau Keterbukaan Informasi Publik Terhadap Badan Publik (Studi kasus Komisi Pemilihan Umum Sumbawa Tahun 2020)

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 26 Agustus 2022

Penulis



Rizki Yarman Septiansyah
NIM. 218130087

Mengetahui,
Kepala UPT Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

MOTTO

“Barang siapa keluar untuk mencari sebuah ilmu, maka ia akan berada di jalan Allah hingga ia kembali.”

(HR Tirmidzi)

“ Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras. Tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan. Tidak ada kemudahan tanpa doa.”

(Ridwan Kamil)

“ Setiap hidup punya waktu dan proses nya masing-masing, jangan buta akan pencapaian orang lain.”

(Rizki Yarman Septiansyah)



PERSEMBAHAN

Penulis mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kasih sayang kepada kita semua terutama penulis sendiri sehingga skripsi ini selesai.

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Untuk ibunda tercinta Ana Suljana dan ayahanda Ona Sofyan yang saya cintai. Dengan petunjuk Allah SWT, bapak dan ibu ku telah mendidik, membesarkanku serta menyekolahkanku, terik matahari membakar kulit-kulit indahmu demi anakmu dalam meraih cita-cita mulia ini. Terimakasih Ayahanda dan Ibunda atas jasa-jasamu yang tidak ku lupakan.
2. Untuk keluarga besar nenek dan kakek, paman, bibi, yang saya cintai selama ini selalu mendukung saya selama ini mulai dari pertama kuliah sampe saya menyelesaikan studi ini.
3. Teman-teman ku dan yang lainnya tak dapat saya sebut satu per satu yang paling saya banggakan, terimakasih atas dukungan dan bantuannya.
4. Semua Dosen dan Staff FISIP yang telah menjadi bagian hidup saya, terimakasih atas didikan yang telah diberikan semasa kuliah serta masukan-masukannya.
5. Ucapan terimakasih kepada Almamater Universitas Muhammadiyah Mataram tercinta.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, Puji syukur yang tak terhingga penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan skripsi ini yang berjudul **“PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMANTAU KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TERHADAP BADAN PUBLIK (Studi Kasus Komisi Pemilihan Umum Sumbawa Tahun 2020)** dengan lancar dan tepat waktu.

Selesainya penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, *support*, arahan dan bimbingan banyak pihak. Oleh sebab itu penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abd Gani., M.Pd selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Ali, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
3. Bapak Ayatullah Hadi, S.IP., M.IP selaku Ketua Prodi Studi Ilmu Pemerintahan.
4. Bapak Ayatullah Hadi, S.IP., M.IP selaku Dosen Pembimbing Utama.
5. Bapak Ridwan, S.IP., M.M selaku Dosen Pembimbing Kedua.
6. Untuk kedua Orang tua saya, Bapak Ona Sofyan dan Ibu Ana Suljana. Terima kasih untuk segalanya. Semoga Tuhan Meridhoi apa yang telah bapak/ibu lakukan dan perjuangkan untuk saya.
7. Untuk adik-adik saya, Ilham Dwi Agusfiansyah dan Sofy Febriana Syaputri terima kasih sudah memberikan doa

8. Untuk kekasih tercinta, Maradheta Amellia Yupita terima kasih atas bantuannya yang sangat banyak serta doa dan tenaganya untuk mendukung dalam menyelesaikan pendidikan saya.
9. Untuk Artim Gushadi, Irvan, Nasruddin, M. Gama Bhakti Nusantara, Sudarmansyah, Akmal Defani, selaku sahabat saya, yang selalu memberikan keceriaan dan berbagi dalam suka maupun duka untuk sama-sama memperjuangkan skripsi ini.
10. Semua teman-teman Studi Ilmu Pemerintahan Kelas C angkatan 2018 terima kasih atas kerja samanya.
11. Dan seluruh pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi menyempurnakan hal tersebut. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk kita semua, khususnya pihak yang ingin meneliti tentang masalah yang terkait dengan ilmu sosial dan ilmu politik.

Mataram, Agustus 2022

Penulis,

Rizki Yarman Septiansyah

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMANTAU KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TERHADAP BADAN PUBLIK

(STUDI KASUS KOMISI PEMILIHAN UMUM SUMBAWA TAHUN 2020)

Rizki Yarman Septiansyah¹ , Ayatullah Hadi, S.IP., M.IP² , Ridwan,
S.IP., MM³

Mahasiswa¹ , Pembimbing Utama² , Pembimbing³
Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kendala yang dialami pemerintah dalam memberikan informasi mengenai partisipasi masyarakat dalam memantau keterbukaan informasi publik dalam lembaga Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020. Penelitian ini merupakan penelitian Jenis Kualitatif Deskriptif yang menggunakan variabel Partisipasi Interaktif dan Partisipasi Self Mobilization. Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data primer dan data sekunder. Dimana data tersebut berupa hasil wawancara dengan narasumber, dokumentasi serta analisis hasil data yang dilakukan oleh pihak Komisi Pemilihan Umum Sumbawaa Tahun 2020.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam memantau keterbukaan informasi publik terhadap badan publik pada kegiatan Pilkada Sumbawa Tahun 2020 yang dilakukan oleh Lembaga KPU mengalami peningkatan. Masyarakat berpartisipasi dengan inisiatif sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, hal ini menunjukkan bahwa partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah merupakan bentuk Partisipasi Self Mobilization. Adapun partisipasi ditunjukkan melalui Hasil dari analisis pemerolehan suara Pilkada Sumbawa Tahun 2020 dimenangkan oleh Drs. H. Mahmud Abdullah dan Dewi Noviany, S.Pd.,M.Pd , dimana hasil pemungutan suara ini dianalisis oleh lembaga KPU, lembaga lainnya yang terkait, dan juga bersama masyarakat yang turut berpartisipasi. Adapun kendala yang dialami pemerintah dalam memberikan informasi ialah kendala internal yang artinya kendala yang berasal dari pribadi masyarakat seperti faktor teknis maupun faktor pekerjaan.

Kata Kunci : Partisipasi Masyarakat, Informasi Publlik, KPU Sumbawa

**COMMUNITY INVOLVEMENT IN SUPERVISING PUBLIC INFORMATION
DISCLOSURE TO PUBLIC AGENCY
(CASE STUDY OF SUMBAWA GENERAL ELECTION COMMISSION IN 2020)**

Rizki Yarman Septiansyah¹, Ayatullah Hadi, S.IP.,M.IP², Ridwan, S.IP.,MM³
Student¹, Main Supervisor², Advisor³
Government Science Study Program, Faculty of Social and Political Sciences
Muhammadiyah University of Mataram

ABSTRACT

The goal of this study was to determine what challenges the government had while attempting to tell the public about their ability to monitor the release of information in the 2020 General Elections Commission. Interactive Participation and Self Mobilization Participation variables are used in this descriptive qualitative study. Primary data and secondary data were the sources of the data used in this study. Whereas the Sumbawaa General Election Commission 2020 conducted resource person interviews, documented the outcomes, and analyzed the data.

The findings of this study demonstrate that there has been an increase in public involvement in monitoring the disclosure of public information to public entities during the 2020 Sumbawa Pilkada organized by the KPU. The fact that the community participated in the Regional Head Election on their own initiative and without being forced to do so by any party demonstrates that their involvement was a type of self mobilization participation. The findings of the vote analysis conducted by the KPU, other relevant institutions, and the participating communities for the 2020 Sumbawa Pilkada, which was won by Drs. H. Mahmud Abdullah and Dewi Noviany, S.Pd., M.Pd, demonstrate the involvement. Internal restrictions, or restraints originating from private communities like technological reasons and work considerations, are what prevent the government from giving information.

Keywords: Community Participation, Public Information, Sumbawa KPU



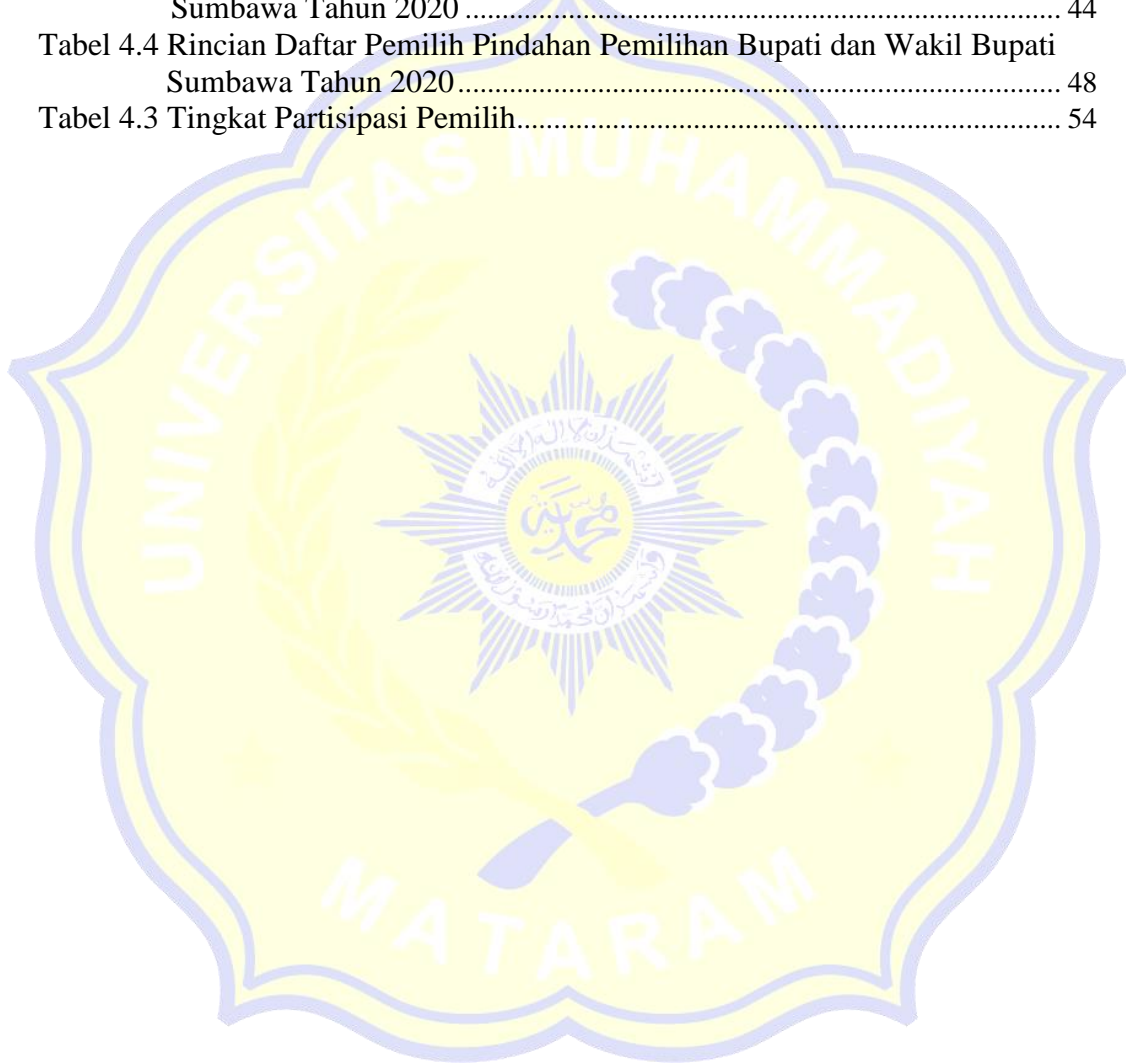
DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	v
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Penelitian Terdahulu.....	8
2.2 Partisipasi.....	14
2.2.1 Pengertian Partisipasi.....	14
2.2.2 Konsep Partisipasi.....	16
2.2.3 Jenis-jenis Partisipasi.....	17
2.2.4 Fungsi Partisipasi	18
2.2.5 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi.....	19
2.2.6 Tipe - Tipe Partisipasi	21
2.3 Keterbukaan Informasi Publik.....	22
2.3.1 Pengertian Keterbukaan Informasi Publik	22
2.3.2 Tujuan Keterbukaan Informasi Publik.....	22
2.3.3 Prinsip Keterbukaan Informasi Publik.....	23

2.3.4 Manfaat Keterbukaan Informasi Publik	23
2.4 Badan Publik.....	25
2.4.1 Pengertian Badan Publik.....	25
2.4.2 Fungsi Badan Publik	25
2.4.3 Ruang Lingkup Badan Publik	26
2.5 Kerangka Pikir Penelitian	27
BAB III METODE PENELITIAN	28
3.1 Metode Penelitian	28
3.3.1 Sumber Data Primer.....	29
3.3.2 Sumber Data Sekunder.....	30
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	31
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	31
3.4 Teknik Analisa Data	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	35
4.1 Profil Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa	35
4.1.1 Struktur Lembaga KPU Sumbawa.....	37
4.1.2 Tugas dan Wewenang KPU Sumbawa	40
4.2 Daftar Pemilih.....	40
4.2.1 Syarat-syarat menjadi pemilih tetap, sebagai berikut :	40
4.2.2 Jenis-Jenis Daftar Pemilih.....	41
4.3 Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020	51
4.3.1 Partisipasi Interaktif	51
4.3.2 Partisipasi Self Mobilization	58
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	75
5.1 Kesimpulan.....	75
5.2 Saran	76
DAFTAR PUSTAKA.....	77

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	11
Tabel 3.1 Unit Analisis Data Primer.....	29
Tabel 3.2 Unit Analisis Data Sekunder.....	30
Tabel 4.1 Pengurus KPU Sumbawa Periode 2019-2024.....	39
Tabel 4.2 DPT Kabupaten Sumbawa 2020.....	43
Tabel 4.3 Rincian Daftar Pemilih Tambahan Pemilihan Bupati dn Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020.....	44
Tabel 4.4 Rincian Daftar Pemilih Pindahan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020.....	48
Tabel 4.3 Tingkat Partisipasi Pemilih.....	54



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.3 Pelayanan Online KPU Sumbawa.....	60
Gambar 4.3 Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih kepada Segmen Pemilih Muda dan Pemilih Pemula.....	63



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Demokrasi ialah sistem pemerintahan yang ada di Indonesia, yang digunakan untuk menentukan atau memutuskan suatu kegiatan atau perencanaan bagi kepentingan masyarakat Indonesia. Demokrasi digunakan sebagai sarana bagi masyarakat dalam mengemukakan pendapatnya, serta menjadi sarana bagi pemerintah untuk memutuskan keputusan dan hasil musyawarahnya bersama masyarakat. Salah satu prinsip dari demokrasi ialah kebebasan, dengan adanya kebebasan setiap masyarakat dapat saling berbagi kekuasaan, informasi dan lain sebagainya yang bertujuan untuk kesejahteraan bersama. Demokrasi sendiri bermakna sebagai landasan dalam kebebasan berpendapat, berkumpul, berserikat maupun landasan sebagai hak memilih dan menentukan keputusan. Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang paling sesuai dengan prinsip serta peraturan yang ada di Indonesia, yang mana dengan adanya sistem demokrasi kesetaraan masyarakat Indonesia di depan Hukum akan sama.

Pada era reformasi di Indonesia saat ini, sistem demokrasi sangat mengalami peningkatan baik aturan kerja maupun pemberian hak-hak informasi publik terhadap masyarakat. Terdapat beberapa hak yang menjadi jaminan keterbukaan informasi yaitu hak mengemukakan pendapat, hak mengajukan permohonan keberatan, hak memantau serta mengawasi kinerja pemerintahan

maupun pejabat publik dalam melaksanakan tugasnya, hak mendapatkan informasi serta hak untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan maupun proses pembentukan kebijakan publik.

Pada hakikatnya Komisi Informasi (KI) ialah lembaga yang di bangun dengan tujuan untuk menjalankan peraturan pelaksana Undang-Undang serta menetapkan petunjuk pelayanan informasi publik secara tepat. Selain itu Komisi Informasi di bangun tidak serta merta tanpa alasan. Pemerintah sendiri memberikan tugas terhadap komisi informasi sesuai dengan aturan dan juga norma-norma yang ada, adapun tugas komisi informasi itu sendiri ialah memverifikasi, menganalisis dan memberikan serta memutuskan permohonan penyelesaian permasalahan informasi publik melalui metode mediasi yang di ajukan oleh setiap warga negara yang memerlukan proses mediasi atau sedang bermasalah dengan pengadilan. berfungsi sebagai lembaga yang menjalankan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya, serta menetapkan petunjuk teknis standar pelayanan informasi publik. Komisi informasi bertugas menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan atau adjudikasi nonlitigasi yang di ajukan oleh setiap pemohon informasi publik.

Undang –Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik adalah salah satu produk hukum Indonesia yang di keluarkan dalam tahun 2008 dan diundangkan pada tanggal 30 april dan mulai berlaku 2 tahun setelah di undangkan. Undang-undang yang terdiri dari 64 pasal ini pada intinya memberikan kewajiban kepada setiap badan publik untuk membuka akses bagi

setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali beberapa informasi tertentu. Undang-undang nomor 14 tahun 2008 bertujuan untuk memastikan hak yang di peroleh oleh warga negara dalam rencana penyusunan pembuatan suatu kebijakan publik, proses penentuan hasil keputusan publik, alasan mengapa ditetapkannya keputusan publik, meningkatkan serta memotivasi masyarakat untuk turut serta dalam mengawasi dan menentukan pengambilan keputusan kebijakan publik, merealisasikan penyelenggaraan negara yang baik, untuk mengetahui alasan kebijakan publik yang menyangkut kesejahteraan hidup warga negara, mencerdaskan kehidupan bangsa serta mengembangkan ilmu pengetahuan lebih luas dan pengelolaan kinerja pelayanan informasi agar menjadi lebih baik dan berkualitas.

Terdapat beberapa hal mengenai pentingnya keterbukaan informasi publik. Keterbukaan informasi publik memiliki peranan penting dalam memotivasi masyarakat untuk berperan aktif dalam proses menjalankan serta menetapkan kebijakan publik. “dengan adanya keterbukaan informasi publik, diharapkan masyarakat dapat semakin aktif terlibat dalam proses pembuatan kebijakan publik, yang mana dapat diawali dari proses tahapan pembangunan rencana, pelaksanaan peninjauan hingga proses pertimbangan hasil dan juga catatan kebijakan ” ungkap wakil presiden K.H. Ma’ruf Amin pada sambutan penganugerahan keterbukaan informasi badan publik tahun 2020. Pada acara yang di selenggarakan oleh komisi informasi ini wapres menuturkan, partisipasi aktif masyarakat ini tidak hanya melalui mekanisme formal seperti pembahasan dalam musyawarah perencanaan pembangunan, tetapi juga melalui mekanisme

partisipasi masyarakat. Keterbukaan informasi publik yang mengundang partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan bisa meminimalisir gejala. “ sehingga saat implementasikan, kecil kemungkinan memicu gejala akibat mispersepsi ataupun penolakan, dan lain sebagainya, “ ujar Ma’ruf. Keterbukaan informasi publik juga mampu mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Menurut aturan dan norma yang di anut oleh sistem demokrasi Indonesia lembaga badan publik diwajibkan untuk menyediakan, memberikan ataupun menyebarluaskan informasi yang sesuai dengan kekuasaannya dan wajib memberikan informasi yang berkaitan dengan kesejahteraan hidup orang banyak. Tetapi tidak semua fakta maupun kabar dapat di bagikan atau dikemukakan di depan khalayak, terdapat beberapa informasi yang harus dirahasiakan atau tidak dapat di bagikan sesuai dengan peraturannya. Pada dasarnya masyarakat memiliki hak untuk mengetahui, melihat, mendengar mengenai informasi publik, menghadiri kegiatan yang bersifat umum yang berhubungan dengan penyampaian atau rencana kerja dengan tujuan untuk mendapatkan dan menerima informasi publik, memperoleh fakta atau dokumen yang memiliki informasi tertentu sesuai dengan permintaan. Serta berhak untuk menyebarluaskan atau mempublikasikan informasi publik yang informasi nya bersifat terbuka atau sesuai dengan peraturan dan norma yang ada. Dengan demikian semakin maksimal keterbukaan informasi publik maka akan semakin maksimal kontribusi masyarakat dalam berpartisipasi.

Dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam alinea ke-empat pembukaan Undang-Undang Dasar negara republik Indonesia tahun 1945, di perlukan HSN yang bersifat bebas dari politik yang tidak sehat, anti korupsi, rekayasa dan tidak mementingkan atau bersikap tidak adil dengan kecenderungan lebih mengutamakan keluarga. Selain itu diperlukannya pola pikir yang mampu menjalankan pelayanan publik baik barang maupun jasa secara profesional, serta mampu menjadi tali sambung antara persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Menurut Fitriadi Agung Prabowo “ partisipasi masyarakat itu penting sebagai kontrol pemerintah agar pemerintah tidak terlena. Secara sederhana, masyarakat memiliki peranan penting dalam mengontrol jalannya pemerintahan. Dengan adanya kontribusi yang dilakukan oleh masyarakat terhadap rencana maupun penyelenggaraan pemerintahan dalam berbagai aspek yang ada sangat di perlukan media yang memadai. Masyarakat dapat berkontribusi atau dapat mengawasi kerja pemerintahan melalui berbagai media, baik dengan cara mengamati pada lokasi atau lembaga publik, maupun melalui media sosial serta website yang telah disediakan oleh masing-masing lembaga publik, masyarakat juga di bebaskan untuk memantau kerja pemerintahan tanpa harus menjadi anggota suatu lembaga atau kelompok, yang artinya masyarakat dapat memantau secara perseorangan. Adanya pantauan dari masyarakat terhadap kinerja lembaga pemerintahan dapat membantu dalam menghindari perilaku menyimpang yang dilakukan oleh para anggota pemerintahan. Hal itu pula yang menjadi faktor pendukung dalam keteraturan pemerintah mengeluarkan kebijakannya.

1.2 Rumusan masalah

Bagaimana partisipasi masyarakat dalam memantau keterbukaan informasi publik dalam lembaga Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Tahun 2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui tentang bagaimana partisipasi masyarakat di kabupaten Sumbawa dalam memantau keterbukaan informasi publik terhadap lembaga Komisi Pemilihan Umum di tahun 2020.

1.4 Manfaat Penelitian

Beberapa faedah yang dapat disimpulkan dari hasil pengamatan ini terdiri dari manfaat Hipotesis, manfaat praktis, dan manfaat secara spekulatif yaitu :

1. Secara Hipotesis, hasil dari pengamatan ini diharapkan dapat suatu ilmu yang berfaedah untuk mengembangkan teori ataupun informasi mengenai bagaimana partisipasi masyarakat dalam memantau keterbukaan informasi publik terhadap badan publik di daerah masing-masing, terutama bagi pemerintah kabupaten Sumbawa.
2. Secara Praktis, penelitian ini bermanfaat untuk membantu penelitian dalam menganalisa bagaimana partisipasi masyarakat dalam memantau keterbukaan informasi publik terhadap badan publik pada lembaga Komisi Pemilihan Umum di kabupaten Sumbawa.

3. Secara Spekulatif, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai kajian ilmu pemerintahan khususnya pada lembaga Komisi Pemilihan Umum. Hasil dari pengamatan ini juga diharapkan layak digunakan sebagai sumber refrensi terhadap penelitian-penelitian selanjutnya dalam aspek permasalahan yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam keterbukaan informasi publik terhadap badan publik.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang selaras dengan penelitian ini, berikut beberapa penelitian tersebut :

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Abdullah Manshur (2012) yang berjudul “Partisipasi Masyarakat dalam proses keterbukaan informasi umum serta kebijakan daerah“. Dalam proses penelitian ini mengemukakan hasil “Partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan keterbukaan informasi umum dan juga kebijakan di daerah semakin mengemuka setelah era reformasi “. Reformasi bidang politik dan pemerintahan yang berjalan seiring dengan semangat otonomi daerah telah menjaadi harapan baru bagi pemerintah dan masyarakat daerah untuk membangun daerahnya sesuai dengan kebutuha dan aspirasi masyarakat tujuan dari penilaian ini juga untuk memungkinkan masyarakat untuk memberikan peran dalam sistem pemerintahan serta untuk menilai kinerja pemerintah dalam membuat aturan kebijakan.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Nunuk Febriananingsih (2012) yang berjudul “ keterbukaan informasi publik dalam pemerintahan terbuka menuju tata pemerintahan yang baik. ” hasil dari penelitian ini adalah dengan terbentuknya Undang-Undang mengenai Keterbukaan Informasi Publik secara tidak langsung menjadi wadah yang memfasilitasi keterbukaan serta

kesiapan informasi yang integral, terstruktur, fokus pada objek institusi. Berdasarkan hal itu, dengan demikian informasi atau kabar mengenai fakta-fakta yang diperlukan lebih gampang di dapatkan baik oleh tenaga kerja pemerintahan maupun para penduduk, hal itu pula akan membuat waktu, tenaga, bahkan biaya akan digunakan secara efektif. Dalam implementasi UU KIP terdapat beberapa informasi yang menjadi hak setiap masyarakat Indonesia, tidak terkecuali informasi yang bersifat mutlak, periodik, maupun serentak. Selain dari pada itu penerapan juga pelaksanaan lainnya yang juga menjadi faktor penting adanya UU KIP ialah bahwa segala urusan perancangan kegiatan pemerintahan seperti kebijakan publik, layanan publik baik jasa maupun barang, penyusunan anggaran-anggaran dana yang aturannya serta keputusannya harus dilakukan secara demokrasi antara pemerintah atau lembaga terkait dengan masyarakat.

Ketiga, penelitian ini dilakukan oleh Edwin Nurdiansyah (2012) Universitas Sriwijaya yang berjudul “ Keterbukaan informasi publik sebagai upaya mewujudkan transparansi bagi masyarakat “. Hasil dari penelitian ini ialah setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh informasi dari berbagai sumber seperti yang diamanatkan oleh UUD NRI 1945, melalui UU KIP pemerintah telah diwajibkan untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan kebijakan publik kepada masyarakat. Melalui keterbukaan informasi, diharapkan terjadi transparansi informasi kepada warga negara mengenai penyelenggaraan negara oleh pemerintah. Dengan adanya transparansi informasi akan mewujudkan masyarakat yang secara aktif turut

serta dalam pengawasan kebijakan publik, sehingga tidak ada rasa saling curiga di antara warga negara dan pemerintah yang akhirnya dapat mewujudkan negara yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat.

Keempat, Penelitian ini dilakukan oleh Idi Dimiyati (2012) yang berjudul “Pemberdayaan Masyarakat dalam Meningkatkan Pemahaman dan Partisipasi mengenai Transaparansi Informasi Publik di Kabupaten Lebak “. Hasil dari penelitian ini memperlihatkan model pemberdayaan masyarakat menggunakan pendekatan struktural dan pendekatan kultural. Pendekatan struktural dilakukan dengan membentuk pusat informasi warga (PIW) diseluruh kecamatan.

Kelima, Penelitian ini dilakukan oleh Iza Rumesten R.S. (2012) Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penelitian ini berjudul “ Model Ideal Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan daerah.” Hasil dari penelitian ini adalah kendala dalam proses pembentukan peraturan daerah berupa kelemahan normatif aturan hukum positif (UU No.10/2004) yang hanya memuat satu pasal, (pasal 53) yang mengatur partisipasi masyarakat, dan tidak mengatur cara atau metode pelaksanaan berpartisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan daerah di kabupaten atau kota, sehingga metode pelaksanaan hak berpartisipasi masyarakat hanya mengandalkan inovasi kepada daerah dan DPRD yang diwujudkan dalam peraturan tata tertib DPRD. Berbagai regulasi sektoral selama ini mendorong dibukanya hak akses publik untuk berperan serta. Namun, pada umumnya hak untuk berperan serta dalam berbagai regulasi itu hanya berhenti pada level

formulasi peraturan daerah, tidak teroperasionisasikan ssampe pada level eturan pelaksanaan yang secara nyata dalam di gunakan sebagai landasan normatif bagi akses publik. Dalam kondisi tersebut, masyarakat yang secara teoritik memiliki hak untuk mengakses informasi publik dalam proses penetapan kebijakan, tidak sungguh-sungguh mampu mempergunakan haknya untuk memantau, mengkritisi dan mengevaluasi kebijakan publik yang ditetapkan oleh pejabat publik.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Partisipasi Masyarakat dalam proses keterbukaan informasi umum serta kebijakan daerah	<p>Penelitian ini sama-sama bertujuan untuk mengamati bagaimana partisipasi masyarakat dalam keterbukaan informasi umum.</p> <p>Sama-sama membahas tentang peran masyarakat dalam lembaga pemerintahan</p>	<p>Tujuan dari penelitian terdahulu ini ialah untuk memungkinkan masyarakat untuk memberikan peran dalam sistem pemerintahan serta untuk menilai kinerja pemerintah dalam membuat aturan kebijakan.</p> <p>Sedangkan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat</p>

			daerah pada kabupaten Sumbawa dalam memantau keterbukaan informasi publik pada lembaga komisi pemilihan umum
2	Keterbukaan Informasi Publik dalam pemerintahan terbuka menuju pemerintahan yang baik	Penelitian terdahulu dan penelitian kali ini sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif yang dimana pembahasannya sama-sama mengenai tentang bagaimana esensialnya keterbukaan informasi bagi masyarakat	Objek penelitian terdahulu ialah mengenai bagaimana proses pemerintahan agar menjadi lebih baik. Sedangkan pada penelitian ini objek yang diteliti ialah bagaimana partisipasi penduduk dalam memantau keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh lembaga KPU
3	Keterbukaan Informasi Publik sebagai upaya mewujudkan	Persamaan dari kedua penelitian ini ialah sama-sama menjadikan keterbukaan informasi publik sebagai sarana	Pada penelitian terdahulu hasil dari penelitiannya ialah mengenai bagaimana pentingnya keterbukaan informasi secara umum,

	Transparansi bagi Masyarakat	transparansi masyarakat dalam memenuhi hak dalam bermasyarakat	sedangkan pada penelitian kali ini hasil dari pembahasannya lebih di khusus kan mengenai keterbukaan informasi publik pada lembaga KPU di Kabupaten Sumbawa.
4	Pemberdayaan Masyarakat dalam Meningkatkan Pemahaman dan Partisipasi Mengenai Informasi Publik di Kabupaten Lebak	Persamaan nya ialah kedua penelitian ini membahas bagaimana metode yang dilakukan pemerintah dalam memberikan informasi serta bagaimana peran partisipasi masyarakat dalam mendukung kegiatan pemerintahan.	Pada penelitian terdahulu menggunakan metode pendekatan struktural. Sedangkan pada penelitian kali ini menggunakan metode pendekatan deskriptif.

5	Model Ideal Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan	Persamaannya ialah sama-sama membahas serta meneliti bagaimana peranan masyarakat dalam memantau atau melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintahan.	Dalam penelitian terdahulu objek penelitiannya ialah bagaimana partisipasi masyarakat dalam membentuk peraturan. Sedangkan pada penelitian ini objek yang di teliti ialah bagaimana partisipasi masyarakat dalam memantau keterbukaan informasi publik pada lembaga KPU.
---	--	---	---

2.2 Partisipasi

2.2.1 Pengertian Partisipasi

Menurut Dewi, Fandeli dan Baiquni (2013), partisipasi masyarakat merupakan suatu hak yang dimiliki masyarakat untuk ikut andil dalam pengambilan keputusan didalam tahapan proses pembangunan, mulai dari awal perencanaan, pelaksanaan, pengawasan maupun pelestarian lingkungan.

Investasi penduduk atau daerah dalam suatu gerakan politik tidak dapat dipisahkan dari kepentingan politik daerah setempat. Dimana daerah merupakan factor utama dalam menentukan perintis

pemerintahan baik di tingkat pusat hingga tingkat paling bawah, khususnya desa.

Menurut Syafilie 2002 (dalam Firgi Ries Pratama (2020:13), keikutsertaan penduduk ialah kepastian perbuatan maupun kontribusi keinginan perseorangan dalam keadaan dan keadaan organisasi, yang memotivasi orang tersebut untuk berminat mencapai tujuan hierarkis, dan berpartisipasi dalam setiap kewajiban bersama.

Kepentingan daerah dalam setiap siklus pembuatan strategi publik sangat penting sebagai kesan standar pemerintahan kerakyatan di Indonesia. Peristiwa ini tentu nya sangat efisien dalam penanaman modal daerah yang pada akhirnya disebut sebagai salah satu aturan mutlak dilakukan oleh otoritas publik dengan tujuan akhir untuk mengakui administrasi yang hebat.

Menurut Adisasmita, (2014 : 4) prinsip partisipasi adalah :

Aturan kepentingan dengan tujuan akhir untuk mengakui pemerintahan yang hebat dibawa keluar melalui pengembangan kerangka jalan yang sangat sesuai dengan pandangan baru yang menciptakan investasi daerah dengan melihat daerah sebagai penonton serta salah seseorang yang mempunyai semangat menolong dan saling melakukan kerja sama dalam kemajuan.

2.2.2 Konsep Partisipasi

Menurut Gaventa dan Valderma 2009 (dalam Firdi Ries Pratama (2020:14) menegaskan bahwa partisipasi masyarakat telah mengalihkan konsep partisipasi menuju suatu kepedulian dengan berbagai bentuk keikutsertaan warga dalam pembuatan kebijaksanaan dan pengambilan keputusan di berbagai gelanggang kunci yang mempengaruhi kehidupan warga masyarakat. Pengembangan konsep dan asumsi dasar untuk meluaskan gagasan dan praktik tentang partisipasi masyarakat meliputi :

1. Partisipasi merupakan hak politik yang melekat pada warga sebagaimana hak politik lainnya. Hak itu tidak hilang ketika ia memberikan mandat pada orang lain untuk duduk dalam lembaga pemerintahan. Sedangkan hak politik, sebagai hak asasi, tetap melekat pada setiap individu yang bersangkutan.
2. Partisipasi langsung dalam pengambilan keputusan mengenai kebijakan publik di lembaga-lembaga formal dapat untuk menutupi kegagalan demokrasi perwakilan. Demokrasi perwakilan masih meyakini beberapa kelemahan ditandai dengan keraguan sejauh mana orang yang dipilih dapat mempresentasikan kehendak masyarakat.
3. Partisipasi masyarakat secara langsung dalam pengambilan keputusan publik dapat mendorong partisipasi lebih bermakna.
4. Partisipasi masyarakat dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan dan lembaga pemerintahan.

Demokratisasi dan desentralisasi di negara berkembang termasuk Indonesia terjadi dalam situasi rendahnya kepercayaan terhadap penyelenggaraan dan lembaga pemerintahan. Dengan melibatkan warga dalam proses pengambilan keputusan maka diharapkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dapat terus ditingkatkan, dan meningkatkan warga dipercaya sebagai indikator penting bagi menguatnya dukungan dan keabsahan pemerintah yang berkuasa.

2.2.3 Jenis-jenis Partisipasi

Menurut Dwiningrum (2011), partisipasi dibagi menjadi 4 jenis, yaitu :

1. Partisipasi dalam pengambilan keputusan.

Partisipasi ini terutama berkaitan dengan penentuan alternatif dengan masyarakat berkaitan dengan gagasan atau ide yang menyangkut kepentingan bersama. Wujud partisipasi dalam pengambilan keputusan ini antara lain seperti ikut menyumbangkan gagasan atau pemikiran, kehadiran dalam rapat, diskusi dan tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan.

2. Partisipasi dalam pelaksanaan.

Partisipasi ini meliputi menggerakkan sumber daya, kegiatan administrasi, koordinasi dan penjabaran program. Partisipasi dalam pelaksanaan merupakan kelanjutan dalam rencana yang telah digagas sebelumnya baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan maupun tujuan.

3. Partisipasi dalam pengambilan manfaat.

Partisipasi dalam pengambilan manfaat tidak lepas dari hasil pelaksanaan yang telah dicapai baik yang berkaitan dengan kualitas maupun kuantitas. Dari segi kualitas dapat dilihat dari output, sedangkan dari segi kuantitas dapat dilihat dari persentase keberhasilan program.

4. Partisipasi dalam evaluasi.

Partisipasi dalam evaluasi dengan pelaksanaan program yang sudah direncanakan sebelumnya. Partisipasi dalam evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui ketercapaian program yang sudah direncanakan sebelumnya.

2.2.4 Fungsi Partisipasi

Keikutsertaan Masyarakat atau yang biasa disebut partisipasi merupakan hal yang sangat memotivasi kinerja pemerintahan dalam menetapkan kebijakan publik. Dengan adanya keikutsertaan ini juga artinya penduduk telah menggunakan hak nya dalam pengawasan pemerintahan. Terdapat beberapa fungsi yang di jelaskan mengenai fungsi partisipasi :

1. Keikutsertaan penduduk dapat membantu berjalan lancarnya rencana kerja pemerintahan
2. Dalam bidang sosial maupun politik turut serta masyarakat sangat membantu dan dapat mengupayakan pemerintah bekerja lebih baik.
3. Dapat memantau pemerintahan dalam mengeluarkan serta mematuhi kebijakannya.

2.2.5 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi

Partisipasi dilakukan tidak serta merta dapat terjadi.

Terdapat pula beberapa pendompleng yang memengaruhi partisipasi, beberapa pendompleng tersebut :

1. Umur, umur memiliki peran penting dalam mendompleng kegiatan maupun keikutsertaan. Pada umumnya, masyarakat yang memiliki umur yang cukup matang akan lebih berpartisipasi daripada masyarakat yang masih remaja. Namun pada zaman kini, tidak sedikit remaja yang turut serta berkontribusi untuk mengikuti kegiatan pemerintahan.
2. Kesadaran, penduduk yang memiliki kesadaran dan pemahaman yang cukup kuat merupakan salah satu keharusan yang dimiliki untuk mengikuti jalannya pemantauan kinerja lembaga publik. Pemahaman disini termasuk mengenai hal pendidikan. Pendidikan dianggap sesuatu hal yang wajib dimiliki untuk mendompleng peningkatan sumber daya manusia yang lebih baik.

3. Jenis kelamin, pada zaman dahulu hanya pria yang diwajibkan atau lebih diutamakan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang berada di luar rumah. Namun pada era reformasi saat ini hal tersebut tidak berlaku lagi. Pada saat ini tidak ada nya kesenjangan antara pria maupun wanita.
4. Pekerjaan serta pendapatan, tidak dapat di pungkiri pada saat ini masyarakat berbondong-bondong untuk mencari pekerjaan yang dapat menghasilkan penghasilan yang memuaskan. Masyarakat kini lebih mengutamakan untuk memperbaiki ekonomi mereka. Hal itu tentu saja sangat berpengaruh pada kegiatan partisipasi masyarakat. Sederhananya ialah, masyarakat yang memiliki pendapatan yang cukup serta pekerjaan yang tetap biasanya lebih berkontribusi terhadap kegiatan pemerintahan
5. Ambisi atau tekad, tidak akan adanya kontribusi apabila tidak adanya tekad atau ambisi dari pribadi masyarakat. Pada umumnya, masyarakat yang memiliki ambisi untuk menjadi anggota pemerintahan, biasanya akan lebih semangat untuk berkontribusi.

2.2.6 Tipe - Tipe Partisipasi

Menurut Hobley dalam Aprillia Theresia dan teman-teman (2014: 204-206) mengidentifikasi partisipasi masyarakat menjadi tujuh tipe berdasarkan karakteristiknya, yaitu sebagai berikut :

1. Partisipasi Pasif atau manipulatif. Partisipasi ini dilakukan dengan cara diberi tahu apa yang sedang atau telah terjadi.
2. Partisipasi dengan cara memberikan informasi. Masyarakat berpartisipasi dengan cara memberi atau menjawab pertanyaan kepada pihak berwajib atau pemerintahan.
3. Partisipasi konsultasi yaitu masyarakat berpartisipasi dengan cara berkonsultasi.
4. Partisipasi insentif yaitu berpartisipasi dengan cara menyediakan sumber daya seperti tenaga kerja.
5. Partisipasi fungsional ialah berpartisipasi dengan membentuk kelompok untuk mencapai tujuan yang berhubungan dengan proyek atau kegiatan lainnya.
6. Partisipasi interaktif ialah berpartisipasi dalam analisis bersama yang mengarah pada perencanaan kegiatan dan pembentukan lembaga sosial baru atau penguatan kelembagaan yang telah ada.
7. Partisipasi self mobilization ialah berpartisipasi dengan mengambil inisiatif secara bebas serta untuk mengembangkan kontak dengan lembaga-lembaga pemerintahan lain.

2.3 Keterbukaan Informasi Publik

2.3.1 Pengertian Keterbukaan Informasi Publik

Keterbukaan informasi publik secara umum adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan di terima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara atau badan publik lainnya.

2.3.2 Tujuan Keterbukaan Informasi Publik

Menurut Undang-Undang tujuan dari keterbukaan informasi publik adalah :

1. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik.
2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik.
3. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik.
4. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.
5. Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak.

6. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
7. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi dilimkgungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

2.3.3 Prinsip Keterbukaan Informasi Publik

Keterbukaan informasi publik memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Setiap informasi publik pada dasarnya bersifat terbuka dan dapat di akses
2. Informasi yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas
3. Setiap informasi harus dapat diperoleh secara cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara yang mudah
4. Informasi yang di kecualikan bersifat rahasia sesuai dengan undang-undang kepatutan, dan kepentingan umum yang di dasarkan pada pengujian menyangkut konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi dibuka, dan setelah mempertimbangkan dengan seksama bahwa dengan menutup informasi tersebut dapat melindungi kepentingan publik yang lebih besar daripada membukanya.

2.3.4 Manfaat Keterbukaan Informasi Publik

Ketrubukaan informasi publik memberikan keuntungan baik bagi masyarakat maupun badan publik. Keterbukaan atau transparansi memberikan peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan peran serta mereka dalam penyelenggaraan negara, sedangkan bagi badan publik

memberikan peluang untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi sebagai *good governance*.

Keterbukaan informasi publik memberikan manfaat antara lain :

1. Adanya jaminan hak bagi setiap orang untuk mengetahui rencana, program, alasan pengambilan suatu kebijakan publik termasuk yang terkait dengan hajat hidup orang banyak dan juga proses.
2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik
3. Mendorong penyelenggaraan negara yang baik, yaitu transparansi, efektifitas, efisiensi, dan akuntabel
4. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa
5. Meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

2.4 Badan Publik

2.4.1 Pengertian Badan Publik

Badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah.

2.4.2 Fungsi Badan Publik

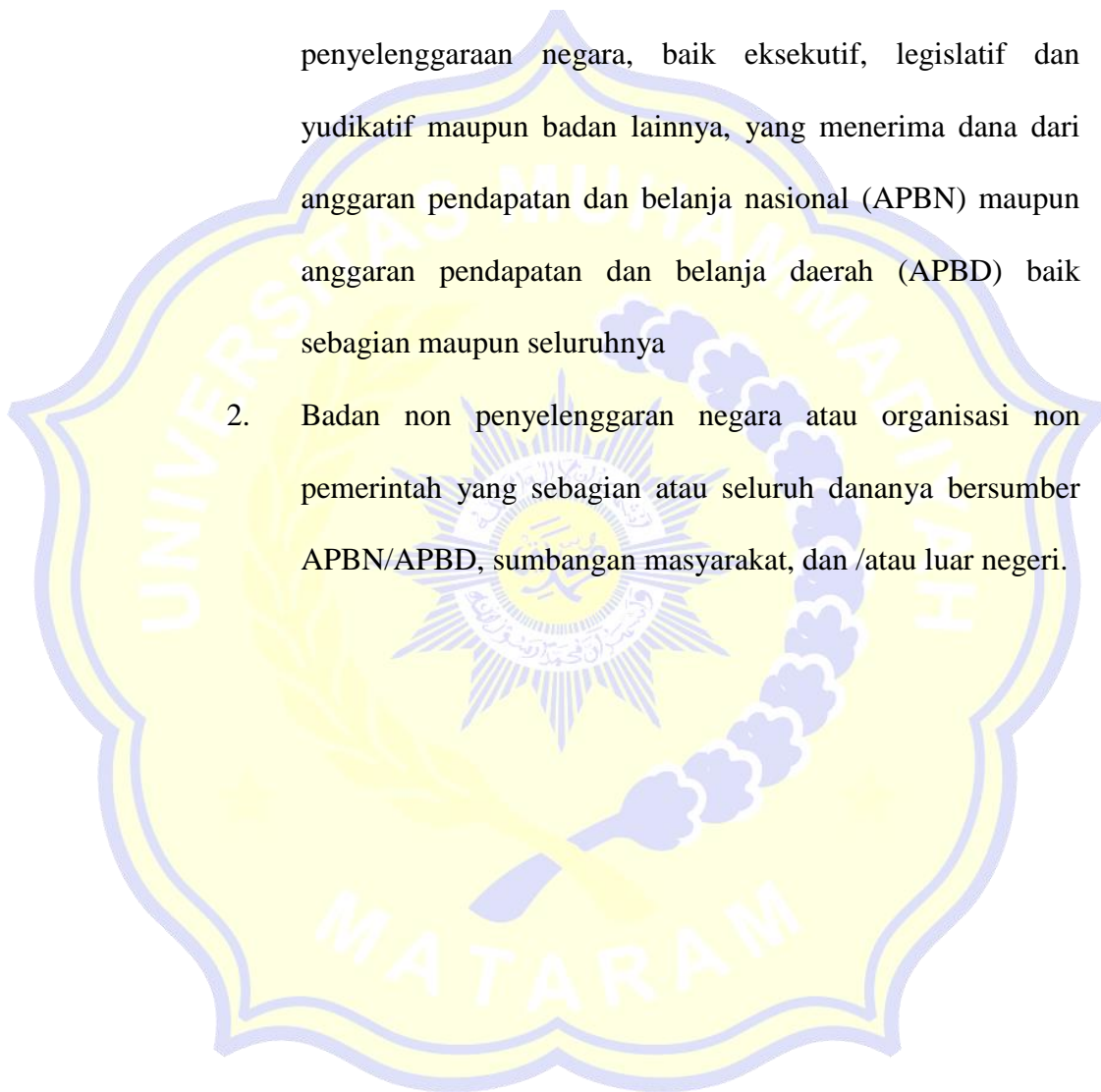
Terdapat 4 fungsi badan publik sebagai berikut :

1. Fungsi Regulasi, pengaturan, perizinan, dan penyelenggaraan pemerintahan negara.
2. Fungsi Alokasi untuk mengelolah dan mendayagunakan sumber daya alam \.
3. Fungsi Distribusi untuk memenuhi pelayanan kebutuhan publik dan pemerataan bangunan
4. Fungsi Stabilitas untuk kepentingan pertahanan dan keamanan, moneter dan fiskal.

2.4.3 Ruang Lingkup Badan Publik

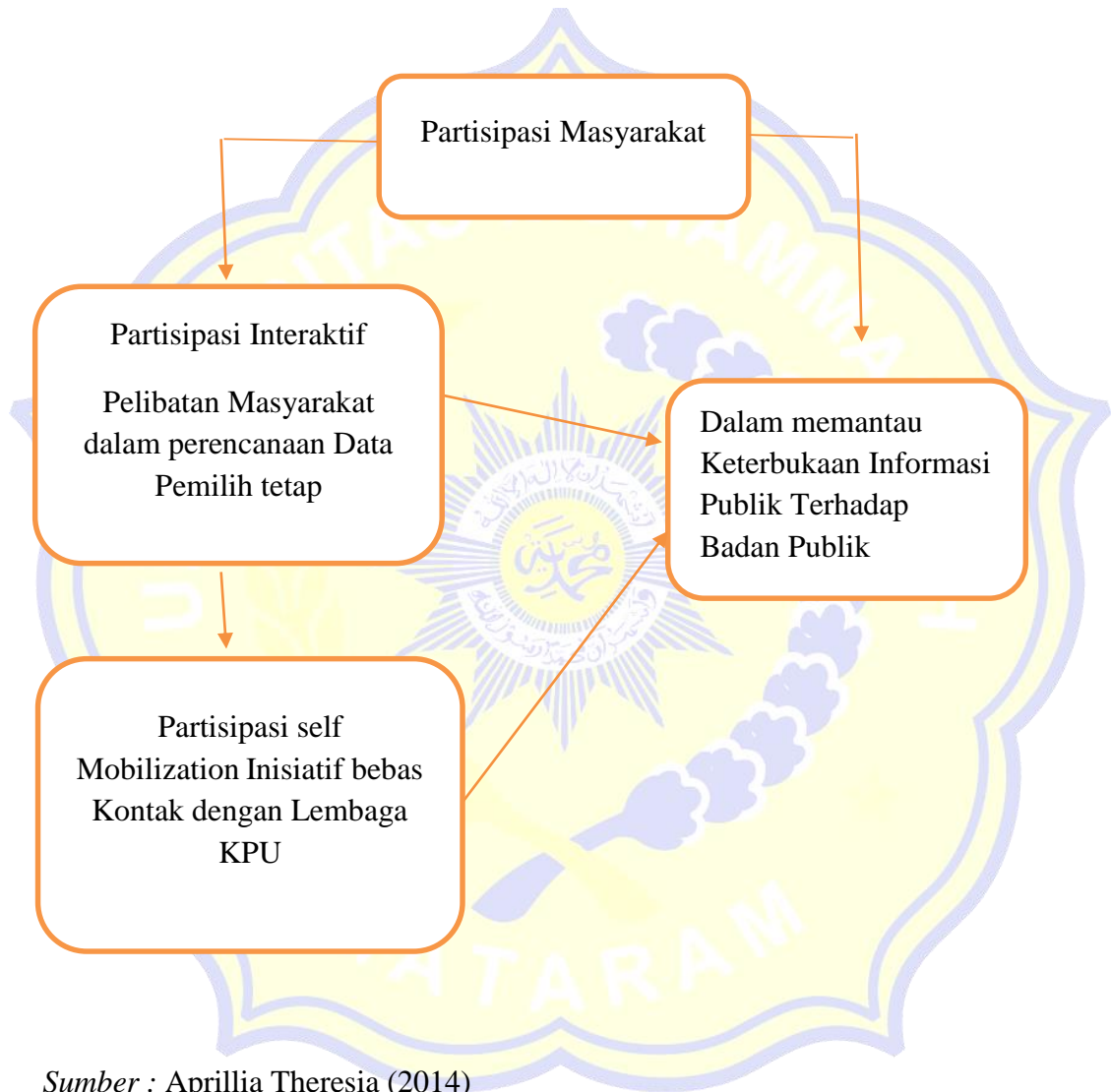
Kriteria untuk menentukan ruang lingkup badan publik dapat dilihat pada pasal 1 ayat 3 UU KIP, yaitu :

1. Badan publik yang fungsi dan tugasnya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, baik eksekutif, legislatif dan yudikatif maupun badan lainnya, yang menerima dana dari anggaran pendapatan dan belanja nasional (APBN) maupun anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) baik sebagian maupun seluruhnya
2. Badan non penyelenggaran negara atau organisasi non pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan /atau luar negeri.



2.5 Kerangka Pikir Penelitian

Gambar 2.1
Kerangka Pikir Penelitiann



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian jenis kualitatif merupakan penelitian yang hasilnya akan dipaparkan secara deskriptif atau secara sederhana artinya penelitian yang hasilnya dijabarkan dengan kata-kata (paragraf). Menurut Lofland dalam Moleong, (2013:157) sumber data utama dalam penelitian kualitatif ini ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Jenis penelitian ini bisa digunakan untuk menganalisis partisipasi masyarakat dalam memantau keterbukaan informasi publik terhadap badan publik. Tujuannya ialah untuk melihat serta mengawasi bagaimana kinerja kerja pemerintahan dalam memberikan hak keterbukaan informasi untuk masyarakat serta untuk memantau peran masyarakat dalam dunia pemerintahan. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif yang dimana variabel dan juga data berbentuk paragraf atau kalimat. Pendekatan ini berfungsi untuk memaparkan serta menjabarkan permasalahan yang ada.

Berdasarkan metode dan pendekatan, maka sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah sumber data primer dan sumber data sekunder. Dapat diketahui bahwa sumber data primer dan sumber data sekunder ialah sebagai berikut :

3.3.1 Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber data yang pertama atau sumber data inti. Sumber data primer juga di dapatkan berdasarkan hasil wawancara secara langsung di lapangan atau lokasi penelitian. Data yang di dapatkan tidak melalui perantara atau sumber sumber lainnya.

Tabel 3.1
Unit Analisis Data Primer

NO	Variabel	Indikator	Jenis Data	Sumber Data
1	Partisipasi Interaktif	Pelibatan masyarakat dalam perencanaan data pemilih tetap	Bagaimana pelibatan masyarakat dalam perencanaan data pemilih tetap	Staf pelaksana teknis pemilu dan hubungan partisipasi masyarakat
2	Partisipasi Self Mobilization	Inisiatif bebas dan kontak dengan lembaga KPU	Bagaimana inisiatif masyarakat dalam memantau keterbukaan informasi publik terhadap Lembaga KPU	Kepala sub bagian teknis dan partisipasi informasi masyarakat

Sumber : *Hobley dalam Aprillia Theresia (2014: 204-206)*

3.3.2 Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang di dapatkan atau diperoleh dari sumber kedua atau melalui perantara. Sumber ini diberikan atau disampaikan secara tidak langsung. Sumber data sekunder ini di dapatkan biasanya melalui dokumen-dokumen, hasil wawancara atau pun data lainnya yang tidak di dapatkan data sumber inti. sumber data sekunder digunakan sebagai penguat data inti.

Tabel 3.2
Unit Analisis Data Sekunder

NO	Variabel	Indikator	Jenis Data	Sumber Data
1	Partisipasi Interaktif	Pelibatan masyarakat dalam perencanaan data pemilih tetap	Bagaimana pelibatan masyarakat dalam perencanaan data pemilih tetap	Staf pelaksana teknis pemilu dan hubungan partisipasi masyarakat
2	Partisipasi Self Mobilization	Inisiatif bebas dan kontak dengan lembaga KPU	Bagaimana inisiatif masyarakat dalam memantau	Kepala seksi bagian teknis dan partisipasi informasi masyarakat

			keterbukaan informasi publik terhadap Lembaga KPU	
--	--	--	---	--

Sumber : *Hobley dalam Aprillia Theresia (2014: 204-206)*

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Penelitian ini dilakukan selama kurang lebih 1 bulan.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini menggunakan beberapa teknik dalam mengumpulkan data. Berikut ini ialah beberapa teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data :

1. Wawancara

Secara sederhana dapat diartikan bahwa wawancara ialah suatu proses kegiatan interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang di wawancarai melalui komunikasi secara langsung. Komunikasi secara langsung ini dilakukan dengan betatap muka baik di lokasi penelitian ataupun melalui media telepon. Wawancara juga merupakan suatu metode untuk memperoleh keterangan yang digunakan untuk mencari serta memenuhi hasil penelitian dengan cara tanya jawab dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara. Wawancara

bertujuan untuk menanyakan atau menyampaikan beberapa pertanyaan atau opini yang menjadi variabel data dalam penelitian. Dengan dilakukannya metode wawancara, peneliti diharapkan dapat memperoleh data yang cukup banyak yang nantinya akan di jabarkan atau diungkapkan dalam hasil penelitian. Selain sebagai referensi data dalam hasil penelitian, metode wawancara juga diharapkan menjadi jembatan kerja sama antara individu dengan suatu organisasi atau lembaga. Selain itu metode wawancara juga dapat membuka pengetahuan lebih luas mengenai aspek permasalahan yang di teliti..

2. Observasi

Observasi secara sederhana ialah kunjungan atau peneliti secara langsung turun ke lapangan atau lokasi penelitian. Metode atau teknik observasi ialah metode yang pada umumnya digunakan dalam penelitian berjenis kualitatif. Tujuan dari observasi ialah untuk melihat secara langsung bagaimana keadaan atau kondisi lokasi penelitian. Selain itu dengan dilakukannya observasi peneliti lebih mudah mendapatkan data karena dapat bertukar pikiran dengan sumber-sumber yang nantinya di temui di lokasi observasi. Hasil dari observasi ini nantinya akan dijadikan sebuah parafrase yang dimana berkaitan atau selaras dengan penelitian jenis kualitatif. Observasi juga dapat mengurangi adanya manipulasi data yang dapat dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. Data yang diperoleh dapat digeneralisasikan melalui teknik observasi. Dalam teknik observasi, deskripsi digunakan sebagai penjabaran mengenai pertanyaan-pertanyaan

sebab-akibat, proses perencanaan, ataupun hasil dari perencanaan itu, yang di jabarkan secara terstruktur.

3.4 Teknik Analisa Data

Selain teknik pengumpulan data, terdapat beberapa teknik dalam menganalisis hasil dari data yang telah terkumpul. Teknik Analisis data ialah sebuah proses yang bertujuan untuk menyederhanakan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca maupun dipahami oleh masyarakat umum. Tidak sedikit permasalahan yang terjadi di sebabkan oleh kurang pahamnya masyarakat mengenai informasi yang telah diberikan. Hal ini tentu saja akan mempengaruhi pemikiran masyarakat atau siapa pun yang membaca hasil data tersebut. Analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini ialah teknik analisis secara kualitatif dengan menggunakan model analisis interaktif. Dapat diketahui bahwa aktifitas dalam analisis data di jelaskan sebagai berikut :

1. Reduksi Data (Pemilihan/Sortir)

Seperti yang sudah di jelaskan dan di cantumkan pada penjelasan sebelumnya, data yang di dapatkan dari hasil wawancara atau pun observasi harus di analisis terlebih dahulu untuk mengetahui mana data yang pantas di publikasi kan atau mana data yang kurang tepat untuk di publikasikan. Dengan begitu perlu dilakukannya reduksi data dalam proses analisis data. Reduksi data ialah proses yang digunakan untuk mempertegas, memperjelas, menyederhanakan atau memfokuskan kepada inti permasalahan sehingga data atau informasi yang di publikasikan lebih mudah di pahami oleh masyarkat yang menerima informasi. Proses reduksi dalam

analisis data juga berfungsi untuk mempermudah peneliti dalam menentukan kesimpulan berdasarkan hasil wawancara ataupun observasi.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan sekumpulan data atau informasi yang dijabarkan atau dijelaskan dalam bentuk naratif atau kalimat. Data-data yang diperoleh dari hasil pengumpulan dan analisis data akan di sajikan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang digunakan. Penyajian data haru sesuai dan mengacu pada rumusan masalah serta tujuan penelitian sehingga nantinya data yang disajikan dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang ada.

3. Penarikan Kesimpulan

Data yang telah diperoleh dari hasil pengumpulan data selanjutnya akan di analisis melalui beberapa tahap proses analisis, hingga pada akhir dapat ditarik beberapa kesimpulan yang ada. Kesimpulan tidak serta merta dapat disimpulkan, dalam proses penyimpulan data diperlukan nya pemahaman yang kuat, ketelitian, hasil-hasil dari berbagai proposisi, sebab-akibat, serta perlunya verifikasi data kesimpulan sehingga kesimpulan yang ada dapat di tanggung jawabkan kebenaran dan kesesuaiannya.